



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2022**

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
BAB IPENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	15
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat	39
3.3. Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB V PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalkan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja OPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dan tahun

berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2022.

Sebagai organisasi perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu bertanggung jawab terhadap:

- Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur;
- Menanggulangi Kemiskinan Melalui Penyediaan Kebutuhan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Selanjutnya, Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2022 akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

- 1.3.1 Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat adalah :

“Untuk menyediakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022 yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron dengan RPJM”.

- 1.3.2 Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan fungsi perencanaan pembangunan daerah di urusan pemberdayaan masyarakat dan desa/ nagari

2. Mewujudkan perencanaan pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan nagari yang akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, efisien, dan berkelanjutan
3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat urusan pemberdayaan masyarakat dan nagari sebagai wujud dari upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

- 1.1 *Latar Belakang*, Menguraikan pengertian ringkas Renja, penyusunan rancangan Renja perangkat daerah, keterkaitan antara Renja perangkat daerah dengan dokumen RKPD, Renstra perangkat daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/ Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2 *Landasan Hukum*, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3 *Maksud dan Tujuan*, Memuat penjelasan tentang

maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

- 1.4 *Sistematika Penulisan*, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

- 2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah*, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), capaian Renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- 2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah*, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi

dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

2.4 *Review Terhadap Rancangan Awal RKPD*, memuat tentang perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses dan penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*, bagian ini memuat tentang uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi – asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional*, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 *Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah*, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD

3.3 *Program dan Kegiatan*, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat daerah tahun sebelumnya bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 3 (tiga) program yang terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan dan 27 subkegiatan.

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat semua kegiatan dapat terealisasi, namun ada kegiatan yang realisasinya masih rendah. Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD dan pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2020 di Sajikan pada tabel T-C.29. sebagai berikut :

TABEL T.C 29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021

Nama OPD : DPMN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3			4	5	6	8	9	10
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari								
01	01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	02	01	01		Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	25%	100%
01	02	01	02		Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	25%	100%

01	02	01	03	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Persentase pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	100%
01	02	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana tugas OPD	70%	70%	70%	70%	100%	100%	25%	100%
01	02	02	02	Pengadaan Peralatan/Kendaraan Dan Mesin	Jumlah pengadaan peralatan / kendaraan dan mesin	4 unit	4 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	-	100%
01	02	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas aparatur yang profesional	60%	60%	60%	60%	100%	100%	33%	100%
01	02	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek/ Diklat	13 orang	13 orang	6 orang	6 orang	100%	6 orang	2 orang	16%
07	01	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase lembaga kemasyarakatan nagari yang baik	75%	75%	75%	75%	100%	100%	75%	100%
					Persentase lembaga adat nagari yang baik	30%	30%	40%	30%	100%	50%	40%	100%
07	01	15	01	Penguatan Kelembagaan PKK	Jumlah TP-PKK aktif	103 TP.PKK	103 TP.PKK	103 TP.PKK	103 TP.PKK	100%	103 TP.PKK	31 TP.PKK	100%
01	02	15	02	Evaluasi RPJM, RKP, APB Nagari dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Jumlah Nagari dengan pengelolaan keuangan Nagari Minimal baik	14 Nagari	14 Nagari	50 Nagari	19 Nagari	38%	63 Nagari	19 Nagari	100%

01	02	16	08	Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Jumlah LPMN yang dilatih	16 LPMN	16 LPMN	19 LPMN	16 LPMN	100%	32 LPMN	19 LPMN	100%
01	02	18	01	Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Tim Pengelola barang dan jasa	Jumlah Aparatur dan Tim yang memiliki Kapasitas Pengelola Barang dan jasa	600 orang	600 orang	1.140 orang	600 orang	100%	1.365 orang	410 orang	100%
01	02	18	03	Pelaksanaan Gelar TTG Tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Tingkat Nasional	Jumlah Posyantek yang memiliki TTG	19 Posyantek	19 Posyantek	76 Posyantek	19 Posyantek	25%	79 Posyantek	19 Posyantek	100%
01	02	18	05	Penguatan Kelembagaan Posyandu	Jumlah Posyandu dengan Strata Mandiri	126 Posyandu	126 Posyandu	178 Posyandu	112 Posyandu	63%	230 Posyandu	69 Posyandu	100%
01	02	18	06	Penguatan Kelembagaan Adat	Lembaga Adat Nagari yang memiliki kepengurusan dan sekretariat yang tetap, AD/ART, dan memiliki perna tentang KAN	7 KAN	7 KAN	6 KAN	6 KAN	100%	10 KAN	6 KAN	100%
01	02	21		Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan	Meningkatnya persentase Dasawisma aktif	75%	75%	75%	75%	100%	100%	90%	100%
01	02	21	01	Fasilitasi peringatan hari kesatuan gerak PKK/BBGRM/Jambore PKK/PKK KB Kes	Persentase terlaksananya peringatan hari kesatuan gerak PKK/BBGRM/Jambore PKK/PKK KB Kes untuk prestasi yang baik	20%	20%	20%	20%	100%	40%	30%	100%
01	02	21	02	Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK	Jumlah Nagari yang melaksanakan 10 Program PKK terlaksana di nagari	50%	50%	50%	50%	100%	15 Nagari	10 Nagari	100%

0 1	0 2	2 1	0 3	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase lembaga ekonomi yang berkinerja baik	50%	50%	50%	50%	100%	90%	83%	100%
0 1	0 2	2 1	0 4	Pelatihan, pemberdayaan, pembinaan, dan monitoring pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG)	Jumlah Lembaga Ekonomi BUMNAG kategori baik	50%	50%	10 BUMNAG	13 BUMNAG	130%	12 BUMNAG	10 BUMNAG	100%
0 1	0 2	2 1	0 8	Peningkatan Mutu Pelayanan Badan Pengelola Sarana Air Bersih Pasca Konstruksi (Pamsimas)	Jumlah BP-SPAMS yang dibina	78 BP-SPAMS	78 BP-SPAMS	133 BP-SPAMS	133 BP-SPAMS	100%	233 BP-SPAMS	133 BP-SPAMS	100%
0 1	0 2	2 1	0 9	Pelatihan, pemberdayaan, pembinaan, dan monitoring pengelola ex PNPM	Persentase Lembaga Ekonomi Ex PNPM yang berdaya	20%	20%	40%	40%	100%	50%	20%	100%
0 1	0 2	2 1	1 1	Program Penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga	Rasio penerima program daerah pada BDT	50	50	50	48	100%	0,001	0,001	100%
				Pembangunan Jamban Bagi Keluarga Miskin	Jumlah KK kurang mampu yang mendapat bantuan pembangunan jamban sehat	43 KK	43 KK	50 KK	48 KK	100%	50 KK	-	100%

Simpang Empat, September 2022

PLT KEPALA DPMN

RANDY HENDRAWAN, S.IP, M.Si

NIP.19871212 200701 1 002

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari tidak mempunyai SPM (Standar Pelayanan Minimal), SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan analisis
				2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Persentase Nagari Maju dan Mandiri pada IDM (Indeks Desa Membangun)		1. % nagari dengan indeks ketahanan sosial minimal 0,7	89 %	89 %	90 %	91%	92%	89 %	119,74%	121,59 %	121,59 %	121,59 %	
			2. % Nagari dengan Indeks Ketahanan Ekonomi minimal 0.7	84 %	85%	86%	87%	88%	85%	104,26%	108,77%	108,77 %	108,77 %	
			3. % Nagari dengan Indeks Ketahanan Lingkungan minimal 0,7	15%	22%	30%	40%	45%	22%	89,73 %	94,74%	94,74%	94,74%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

- Kedudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat kategorinya tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya, telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 – 2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang pencapaiannya akan diukur berdasarkan indikator kinerja sasaran maupun indikator kinerja program.

- b. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat.

Dilihat dari kedudukan maupun kategori tipe B, saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat tengah menghadapi suatu kondisi lingkungan eksternal yaitu era globalisasi yang sangat cepat, tingkat keterbukaan informasi yang tinggi serta tuntutan pelayanan masyarakat yang cepat, optimal dan murah, sehingga sangat diperlukan pendekatan pengembangan organisasi yang mampu menyesuaikan dengan perubahan maupun perkembangan kondisi lingkungan eksternal.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat terdiri atas:

❖ **Kepala Dinas**

❖ **Sekretariat, terdiri dari ;**

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Program dan Keuangan

❖ **Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Masyarakat terdiri dari;**

- Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Pedesaan
- Kepala Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Pemerintah Nagari

❖ **Bidang Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat;**

- Kepala Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
- Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Adat
- Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat

❖ **Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna terdiri dari ;**

- Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- Kepala Seksi Ketahanan Pangan, Produksi dan Pemasaran
- Kepala Seksi Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna dan Sarana Prasarana Pedesaan

Berdasarkan susunan organisasi yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat menyelenggarakan tugas dan fungsinya memiliki stuktur organisasi untuk level jabatan struktural yaitu level eselon II, III dan IV.

Permasalahan pelaksanaan Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari adalah :

- a. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang mengelola kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari.
- b. Masih lemahnya pemahaman terhadap koodinasi, antara pengelola kegiatan yang ada di DPMN

- c. Banyaknya aparatur pelaksana kegiatan yang disiplin ilmunya tidak relevan dengan kegiatan pada DPMN
 - d. Banyaknya kegiatan- kegiatan yang seharusnya dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Nagari (Sekretariat Daerah) topang tindih dengan kegiatan – kegiatan di DPMN
- c. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program Nasional.
- Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 – 2026, bahwa Visi Kepala Daerah adalah Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju, dan Sejahtera. Visi tersebut disertai dengan penetapan Misi-nya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat berupaya melaksanakan Misi 1, Misi 3, Misi 8, dan Misi 12 Kepala Daerah yaitu :
- a. Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, professional dan melayani.
 - b. Misi 3 : Mewujudkan masyarakat Pasaman Barat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
 - c. Misi 8 : Peningkatan kualitas sarana dan kesehatan sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang sakit menuju kesembuhan.
 - d. Misi 12 : Pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian masyarakat dan membebaskan daerah terisolir hingga masyarakat mempunyai ekonomi yang baik dan berkesinambungan.

Berkaitan dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan tersebut, untuk pencapaian pembangunan daerah telah

ditetapkan 7 Program urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari termasuk urusan wajib yang semestinya mampu memberikan kontribusi atau dampak terhadap Visi dan Misi tersebut.

d. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat.

a. Tantangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat khususnya dalam peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Nagari, baik internal maupun external organisasi yang menjadi tantangan yaitu :

1. Sangat minimnya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari yang dapat memahami aturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan sebagai regulasi terhadap pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat di nagari.
2. Masih minimnya pedoman kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas –tugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, dalam membina dan mengayomi Nagari – nagari yang ada di Pasaman Barat.
3. Masih rendahnya SDM Aparatur Nagari yang dibina Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, sehingga sulit bagi aparatur Nagari untuk memahami regulasi yang ada, baik perundang-undangan Permendes, Permendagri, dan Peraturan Bupati.

b. Peluang

- a. Adanya Keputusan Menteri PANRB Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Penetapan dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019 diharapkan ada PNS baru ditempatkan pada DPMN, terutama jurusan hukum sehingga pemahaman akan peraturan perundangan meningkat.
- b. Seiring dengan permintaan dokumen dalam rangka penilaian SPIP, dimana diantaranya SOP dan petunjuk teknis, diharapkan dapat membantu aparatur dalam melaksanakan tugas membina dan melayani nagari - nagari di Pasaman Barat.
- c. Adanya kegiatan pelatiba dan bintek diharapkan dapat meningkatkan pemahaman apartur DPMN terhadap peraturan perundangan yang dinamis dan berganti dari waktu ke waktu.
- d. Formulasi Isu – Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis Untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang Direncanakan.

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat, dihadapkan pada sejumlah isu-isu yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan nagar. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah:

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur serta layanan pada pemerintahan nagari .
2. Upaya yang dapat dilakukan adalah pengusulan penambahan aparatur dan mengirimkan aparatur yang ada untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta mencoba melaksanakan tugas sesuai petunjuk teknis dan bekerja sesuai SOP.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat sebagai instansi yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan nagari serta pelayanannya, juga berperan untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan pemerintahan nagari.

Untuk menjalankan Tupoksi DPMN sangatlah membutuhkan SDM dalam jumlah yang cukup dan berkualitas serta di tunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai/modren untuk memenuhi tuntutan kemajuan dan inovasi dalam pelayanan dan pemberdayaan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2022, dapat dilihat berdasarkan tabel T-C.31.

Tabel T-C.3.1

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Kabupaten Pasaman Barat

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2022					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2022					Catatan Penting
	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(5)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				5,513,326,267	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				5,513,326,267	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Terpenuhinya kebutuhan gaji Pegawai dan Sarana Prasarana Perkantoran	100%	4,492,230,267	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Terpenuhinya kebutuhan gaji Pegawai dan Sarana Prasarana Perkantoran	100%	4,492,230,267	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi keuangan	100%	3,961,656,325	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi keuangan	100%	3,961,656,325	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMN	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	21 PNS	2,388,552,154	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMN	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	21 PNS	2,388,552,154	

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMN	1. Jumlah non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran 2. Jumlah Perangkat Nagari yang dijamin pemeliharaannya 3. Jumlah Tenaga Informasi teknologi dan Pengelola website	1. 5 orang PTT 2. 10 orang THL 3. 842 orang perangkat nagari 4. 1 (satu) orang Tenaga Informasi teknologi dan pengelola website	1,510,584,171	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMN	1. Jumlah non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran 2. Jumlah Perangkat Nagari yang dijamin pemeliharaannya 3. Jumlah Tenaga Informasi teknologi dan Pengelola website	1. 5 orang PTT 2. 10 orang THL 3. 842 orang perangkat nagari 4. 1 (satu) orang Tenaga Informasi teknologi dan pengelola website	1,510,584,171	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMN	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	12 bulan	62,520,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMN	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	12 bulan	62,520,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola DPMN		9,600,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola DPMN		9,600,000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMN	Jumlah ASN Penatausahaa	1. 1 orang	9,600,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMN	Jumlah ASN Penatausah	1. 1 orang	9,600,000	

			n Barang Milik Daerah	PNS 2. 1 Orang THL				aan Barang Milik Daerah	PNS 2. 1 Orang THL		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek		28,784,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek		28,784,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	DPMN	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek / Diklat	10 orang	28,784,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	DPMN	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek / Diklat	10 orang	28,784,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1. Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran 2. Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah		242,632,282	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1. Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran 2. Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah		242,632,282	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMN	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	4 jenis	5,602,782	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMN	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	4 jenis	5,602,782	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMN	Jumlah ATK yang	1 paket	36,382,200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMN	Jumlah ATK yang	1 paket	36,382,200	

			dibutuhkan					dibutuhkan			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMN	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan alat pembersih	1 paket	8,544,300	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMN	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan alat pembersih	1 paket	8,544,300	
	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	DPMN	Jenis dan Jumlah Barang yang dicetak dan digandakan	5 Jenis	17,103,000	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	DPMN	Jenis dan Jumlah Barang yang dicetak dan digandakan	5 Jenis	17,103,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar dan dalam Kabupaten	1. Jumlah penyediaan makan/minum rapat 2. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	1. 12 kali 2. 12 kali	175,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar dan dalam Kabupaten	1. Jumlah penyediaan makan/minum rapat 2. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	1. 12 kali 2. 12 kali	175,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor		15,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor		15,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMN	Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMN	Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan			

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMN	Jumlah pengadaan peralatan elektronik penunjang operasional kantor dan administrasi perkantoran	3 unit	15,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMN	Jumlah pengadaan peralatan elektronik penunjang operasional kantor dan administrasi perkantoran	3 unit	15,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah		Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor		109,001,210	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah		Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor		109,001,210	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMN	Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	24 rekening	64,801,210	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMN	Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	24 rekening	64,801,210	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMN	Jumlah SDM kebersihan setiap bulan	4 orang THL	44,200,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMN	Jumlah SDM kebersihan setiap bulan	4 orang THL	44,200,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara		125,556,450	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara		125,556,450	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	DPMN	1. jumlah mobil jabatan yang dipelihara 2. Jumlah	1 unit	17,825,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	DPMN	1. jumlah mobil jabatan yang	1 unit	17,825,000	

	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		kendaraan dinas Jabatan yang akan dilakukan pembayaran pajak/KIR			Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		dipelihara 2. Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang akan dilakukan pembayaran pajak/KIR			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMN	1. jumlah kendaraan operasional yang dipelihara 2. Jumlah kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang akan dilakukan pembayaran pajak/KIR	19 unit	60,491,450	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMN	1. jumlah kendaraan operasional yang dipelihara 2. Jumlah kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang akan dilakukan pembayaran pajak/KIR	19 unit	60,491,450	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMN	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	58 unit	19,920,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMN	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	58 unit	19,920,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMN	1. Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara 2. Jumlah sarana dan prasarana		20,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMN	1. Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara 2. Jumlah sarana dan		20,000,000	

			yang dibangun					prasarana yang dibangun			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMN	Jumlah peralatan yang dipelihara	12 unit	7,320,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMN	Jumlah peralatan yang dipelihara	12 unit	7,320,000	
	Program peningkatan Kerjasama Desa		Meningkatnya ekonomi dikawasan perdesaan		-	Program peningkatan Kerjasama Desa		Meningkatnya ekonomi dikawasan perdesaan		-	
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa		Persentase terlaksananya kerjasama antar desa		-	Fasilitasi Kerja sama antar Desa		Persentase terlaksananya kerjasama antar desa		-	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota		Jumlah nagari yang memiliki kerjasama antar desa			Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota		Jumlah nagari yang memiliki kerjasama antar desa			
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Jumlah pembangunan kawasan perdesaan			Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Jumlah pembangunan kawasan perdesaan			
	Program Administrasi Pemerintahan Desa		1. Persentase nagari yang memiliki administrasi pemerintahan nagari yang tertib dan sesuai peraturan perundang-	100% 100%	319,897,500	Program Administrasi Pemerintahan Desa		1. Persentase nagari yang memiliki administrasi pemerintahan nagari yang tertib dan sesuai	100% 100%	319,897,500	

			undangan 2. Persentase nagari yang memiliki lembaga ekonomi nagari yang aktif.					peraturan perundang-undangan 2. Persentase nagari yang memiliki lembaga ekonomi nagari yang aktif.			
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		1. meningkatnya tata kelola pemerintahan Nagari sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku 2. meningkatnya tata kelola lembaga ekonomi BUMNAG yang ada di nagari	15 Nagari 12 BUMNAG	319,897,500	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		1. meningkatnya tata kelola pemerintahan Nagari sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku 2. meningkatnya tata kelola lembaga ekonomi BUMNAG yang ada di nagari	15 Nagari 12 BUMNAG	319,897,500	

	Fasilitasi penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah administrasi Pemerintahan Nagari yang terselenggara			Fasilitasi penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah administrasi Pemerintahan Nagari yang terselenggara			
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa		Jumlah Peraturan Nagari Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Nagari yang di Evaluasi			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa		Jumlah Peraturan Nagari Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Nagari yang di Evaluasi			
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab.Pasbar	Jumlah RPJM Nagari, RKP Nagari, dan APBNagari yang di evaluasi	38 Dokumen	95,700,000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab.Pasbar	Jumlah RPJM Nagari, RKP Nagari, dan APBNagari yang di evaluasi	38 Dokumen	95,700,000	
	Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa		Jumlah APBNagari yang di evaluasi			Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa		Jumlah APBNagari yang di evaluasi			
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab.Pasbar	Jumlah Aparatur dan Tim yang mengikuti	133 orang	50,000,000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab.Pasbar	Jumlah Aparatur dan Tim yang	133 orang	50,000,000	

			Pelatihan Pengelola Barang dan jasa					mengikuti Pelatihan Pengelola Barang dan jasa			
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	19 Nagari	1. jumlah Lembaga Ekonomi BUMNAG yang dibina 2. jumlah BKAN dan UPK yang dibina	1. 12 BUMNAG 2. 11 UPK dan BKAN	64,999,600	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	19 Nagari	1. jumlah Lembaga Ekonomi BUMNAG yang dibina 2. jumlah BKAN dan UPK yang dibina	1. 12 BUMNAG 2. 11 UPK dan BKAN	64,999,600	
	Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa		Jumlah walinagari yang dipilih, diangkat dan diberhentikan			Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa		Jumlah walinagari yang dipilih, diangkat dan diberhentikan			
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab.Pas bar	Persentase Nagari yang telah melaksanakan pendataan dan entry data Profil Nagari	78%	29,197,900	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab.Pasbar	Persentase Nagari yang telah melaksanakan pendataan dan entry data Profil Nagari	78%	29,197,900	
	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa		persentase Manajemen Pemerintahan nagari yang Baik			Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa		persentase Manajemen Pemerintahan nagari yang Baik			

	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		persentase pengelolaan aset Nagari yang Baik			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		persentase pengelolaan aset Nagari yang Baik			
	Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD		persentase peningkatan pemahaman anggota bamus terhadap Tupoksi			Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD		persentase peningkatan pemahaman anggota bamus terhadap Tupoksi			
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab.Pasbar	1. Persentase Nagari yang telah di evaluasi tingkat perkembangannya 2. Jumlah Monitoring evaluasi Pembangunan di Nagari	78% 15 Nagari	50,000,000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab.Pasbar	1. Persentase Nagari yang telah di evaluasi tingkat perkembangannya 2. Jumlah Monitoring evaluasi Pembangunan di Nagari	78% 15 Nagari	50,000,000	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat		Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang berkinerja baik	100%	701,198,500	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat		Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang berkinerja baik	100%	701,198,500	

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan nagari	40%	701,198,500	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan nagari	40%	701,198,500	
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten, Provinsi dan Nasional	1. Jumlah Lembaga Adat Nagari yang memiliki kepengurusan dan sekretariat yang tetap, AD/ART, dan memiliki perna tentang KAN 2. Jumlah TP-PKK aktif 3. Jumlah LPMN yang dilatih 4. Jumlah Posyandu dengan Strata mandiri 5. Jumlah	19 LPMN 100 Posyandu	150,000,000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten, Provinsi dan Nasional	1. Jumlah Lembaga Adat Nagari yang memiliki kepengurusan dan sekretariat yang tetap, AD/ART, dan memiliki perna tentang KAN 2. Jumlah TP-PKK aktif 3. Jumlah LPMN yang dilatih 4. Jumlah	19 LPMN 100 Posyandu	150,000,000	

			Nagari yang melaksanakan 10 Program PKK					Posyandu dengan Strata mandiri 5. Jumlah Nagari yang melaksanakan 10 Program PKK			
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten pasaman Barat	Jumlah Posyantek yang baik	10 Posyantek	24,994,600	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten pasaman Barat	Jumlah Posyantek yang baik	10 Posyantek	24,994,600	
	fasilitasi Bulan Bhakti gotong royong Masyarakat	Kabupaten	1. Jumlah kegiatan pencanangan Bulan Bhakti Gotong royong 2. terlaksananya pembangunan jamban bagi masyarakat kurang mampu.	1. 1 (satu) kali 2. 50 Unit	26,203,900	fasilitasi Bulan Bhakti gotong royong Masyarakat	Kabupaten	1. Jumlah kegiatan pencanangan Bulan Bhakti Gotong royong 2. terlaksananya pembangunan jamban bagi masyarakat kurang mampu.	1. 1 (satu) kali 2. 50 Unit	26,203,900	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan	Kabupaten, Provinsi dan Nasional	Jumlah Kegiatan peringatan hari kesatuan gerak PKK/Jambore	3 Kegiatan	500,000,000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan	Kabupaten, Provinsi dan Nasional	Jumlah Kegiatan peringatan hari kesatuan	3 Kegiatan	500,000,000	

	Kesejahteraan Keluarga		PKK/PKK KB Kes			Kesejahteraan Keluarga		gerak PKK/Jambor e PKK/PKK KB Kes			
--	------------------------	--	-------------------	--	--	------------------------	--	--	--	--	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan - tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2020 - 2024 adalah:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian, perikanan dan pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sektor jasa, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non-migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.

2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan.

Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, meningkatkan produktivitas sumber daya hutan, mengoptimalkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efisiensi dan

pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antarsektor dan antarwilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.

3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan.

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan. Kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta.

4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim.

Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh.

Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.

6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan.

Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T; meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.

7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.

Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa - Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat - pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat

Didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

Berdasarkan Misi Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Misi 1 dan Misi 3 Kepala Daerah, yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Tahun 2022 adalah seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif	a. Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel b. Terwujudnya Birokrasi yang efisien dan efektif c. Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	a. Opini BPK atas laporan keuangan daerah b. Nilai SAKIP c. Level Maturitas SPIP
2.	Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan	Pengentasan kemiskinan	% Penduduk Miskin

3.3 Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, selain menjalankan program rutin, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat selaku pelaksana penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari berdasarkan azas otonomi selaku perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari untuk itu program-program yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi daerah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dengan Visi : Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju, dan Sejahtera

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari mempunyai fungsi mewujudkan Pasaman Barat yang cerdas dan sejahtera. Secara umum rencana program Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 tertuang dalam 3 (tiga) program yang terdiri dari 9 (Sembilan) kegiatan, dan 28 (dua puluh delapan) subkegiatan dengan rincian Rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan prakiraan maju Tahun 2022 sebagaimana terlampir pada Tabel T-C. 3.3

T-C.3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TA. 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Kode Rekening					Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/K egiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja (Program/Kegiat an/Sub Kegiatan)	Lokasi	Pagu Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
Urus an	Bida ng Urus an	Pr og	Ke g	Sub Keg						Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	13				Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				5,513,326,267		7,885,800,830
2	13	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan Gaji Pegawai dan Sarana Prasarana Perkantoran	100%		4,492,230,430	100%	5,215,899,630
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	100%		3,961,656,325	100%	4,008,386,430
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	21 PNS	DPMN	2,388,552,154	21 PNS	2,649,778,430

2	13	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1. Jumlah non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran 2. Jumlah Perangkat Nagari yang dijamin pemeliharaan kesehatannya 3. Jumlah Tenaga Informasi teknologi dan Pengelola website	1. 5 orang PTT 2. 15 orang THL 3. 842 orang perangkat nagari 4. 1 (satu) orang Tenaga Informasi teknologi dan pengelola website	DPMN	1,510,584,171	1. 5 orang PTT 2. 15 orang THL 3. 842 orang perangkat nagari 4. 1 (satu) orang Tenaga Informasi teknologi dan pengelola website	1,300,000,000
2	13	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	12 bulan	DPMN	68,520,000	12 bulan	58,608,000
2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola DPMN			15,600,000		15,600,000
2	13	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah	1. 1 orang PNS 2. 1 Orang THL	DPMN	9,600,000	1. 1 orang PNS 2. 1 Orang THL	9,600,000
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek		DPMN	20,000,000		50,000,000
2	13	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek / Diklat	13 orang	DPMN	28,784,000	13 orang	50,000,000

2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran 2. Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah			253,750,000		264,250,000
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	4 jenis	DPMN	5,602,782	4 jenis	5,600,000
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan	28 jenis	DPMN	36,382,200	28 jenis	30,500,000
2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga dan alat pembersih	1 paket	DPMN	8,544,300	1 paket	8,000,000
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis dan Jumlah Barang yang dicetak dan digandakan	6 Jenis	DPMN	17,103,000	6 jenis	20,150,000
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah penyediaan makan/minum rapat 2. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	1. 12 kali 2. 12 kali	Luar dan dalam Kabupaten	175,000,000	1. 12 kali 2. 12 kali	200,000,000
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor			20,000,000		400,000,000
2	13	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	0 unit	DPMN		1 unit	375,000,000

2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan penunjang operasional kantor	3 unit	DPMN	15,000,000	3 unit	25,000,000
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor			100,600,000		100,600,000
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	24 rekening	DPMN	64,801,210	24 rekening	56,400,000
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM kebersihan setiap bulan	4 orang THL	DPMN	44,200,000	4 orang THL	44,200,000
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara			92,875,000		383,063,200
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. jumlah mobil jabatan yang dipelihara 2. Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang akan dilakukan pembayaran pajak/KIR	1 unit	DPMN	17,825,000	1 unit	17,825,000

2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. jumlah kendaraan operasional yang dipelihara 2. Jumlah kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang akan dilakukan pembayaran pajak/KIR	20 unit	DPMN	60,491,450	20 unit	46,150,000
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang harus dipelihara	58 unit	DPMN	19,920,000	58 unit	9,700,000
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara 2. Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	1 paket	DPMN	20.000.000	2 paket	305,388,200
2	13	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	12 unit	DPMN	7,320,000	12 unit	4,000,000
2	13	03			Program peningkatan Kerjasama Desa	Meningkatnya ekonomi dikawasan perdesaan			-	10%	100,000,000
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase terlaksananya kerjasama antar desa			-	100%	100,000,000
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah nagari yang memiliki kerjasama antar desa	0 Nagari			0 Nagari	50,000,000

2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah pembangunan kawasan perdesaan	0 kawasan			0 Kawasan	50,000,000
2	13	04			Program Administrasi Pemerintahan Desa	1. Persentase nagari yang memiliki administrasi pemerintahan nagari yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan 2. Persentase nagari yang memiliki lembaga ekonomi nagari yang aktif.	100% 100%		260,000,000	100% 100%	917,298,000
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1. meningkatnya tata kelola pemerintahan Nagari sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku 2. meningkatnya tata kelola lembaga ekonomi BUMNAG yang ada di nagari	15 Nagari 12 BUMNAG		260,000,000	90 Nagari 90 Nagari 90 Nagari 90 BUMNAG	917,298,000
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah administrasi Pemerintahan Nagari yang terselenggara	0 Nagari			0 Nagari	65.000.000
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Peraturan Nagari yang di Evaluasi dan diklarifikasi	0 perna			100 %	65,000,000
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah RPJM Nagari, RKP Nagari yang di fasilitasi	162 Dokumen	Kab.Pasbar	95,700,000	180 dokumen	65,000,000
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa	Jumlah APBNagari yang di fasilitasi	0 Nagari			90 Nagari	65,000,000

2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Wali Nagari yang dipilih, diangkat dan diberhentikan	955 orang	Kab.Pasbar		995 orang	65,000,000
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Terbentuknya BUMNag Bersama Terbentuknya lembaga ekonomi BUMNag yang dibina	1. 11 BUMNag 2. 81 BUMNag	19 Nagari	64,999,600	90 BUMNAG	130,025,000
2	13	04	2.01	9	Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Jumlah walinagari yang dipilih, diangkat dan diberhentikan				90 Nagari	65,000,000
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Terlaksananya pelatihan bagi pokja profil Nagari	78%	Kab.Pasbar	29,197,900	89%	65,000,000
2	13	04	2.01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	persentase Manajemen Pemerintahan nagari yang Baik	100 %			100%	65,000,000
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	persentase pengelolaan aset Nagari yang Baik	100 %			100%	65,000,000
2	13	04	2.01	14	Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD	persentase peningkatan pemahaman anggota bamus terhadap Tupoksi				50%	65,000,000
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1. Persentase terlaksananya evaluasi perkembangan Nagari	100%	Kab.Pasbar	30,000,000	89%	25,623,000
2	13	05			Program Pemberdayaan	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat	100%		480,000,000	100%	1,652,603,200

					Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	dan masyarakat hukum adat yang berkinerja baik					
	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan nagari	40%		480,000,000	60%	1,652,603,200
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga	1. Jumlah Lembaga Adat Nagari yang memiliki kepengurusan dan sekretariat yang tetap, AD/ART, dan memiliki perna tentang KAN 2. Jumlah TP-PKK aktif 3. Jumlah LPMN yang dilatih 4. Jumlah Posyandu dengan Strata mandiri 5. Jumlah Nagari yang melaksanakan 10 Program	19 LPMN 100 Posyandu	Kabupaten, Provinsi dan Nasional	80,000,000	90 KAN 103 TP.PKK 90 LPMN 230 Posyandu 90 Nagari	746,398,500

					Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	PKK					
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum yang berkinerja dengan baik	60 Posyantek	Kabupaten pasaman Barat	24,994,600	100 %	113,758,000
2	13	05	2.01	07	fasilitasi Bulan Bhakti gotong royong Masyarakat	1. Jumlah kegiatan pencanangan Bulan Bhakti Gotong royong 2. terlaksananya pembangunan jamban bagi masyarakat kurang mampu.	1. 1 (satu) kali 2. 50 Unit	Kabupaten	26,203,900	1. 1 (satu) kali 2. 50 Unit	225,000,000
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kegiatan peringatan hari kesatuan gerak PKK/Jambore PKK/PKK KB Kes	3 Kegiatan	Kabupaten, Provinsi dan Nasional	500,000,000	3 Kegiatan	567,446,700

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Rencana kerja(Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat merupakan dokumen perencanaan program kegiatan tahun 2022 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat. Bagi satuan kerja pelaksana program RKPD Tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2022 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2022 dan kebijakan umum APBD. Prioritas dan Plafon anggaran sementara APBD Tahun 2022 masih dalam tahap perencanaan. Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2022 harus dilakukan secara efektif dan efisien, untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan menerapkan prinsip – prinsip safe guarding yaitu transparansi , akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi

Berdasarkan analisis kebutuhan, rumusan kebutuhan program dan kegiatan DPMN Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari pada tahun 2022.

Yang pasti keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja ini sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait.

Diperlukan upaya yang lebih intense antar semua pihak sehingga program dan kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik, selain itu, diperlukan komitmen semua pihak terkait tindak lanjut dari segala kegiatan yang dilaksanakan, mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat sebagai OPD yang bertanggung jawab Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui pengembangan kapasitas sumber daya masyarakat dan Nagari

Maka tindak lanjut (*follow up*) menjadi suatu keharusan dengan demikian dokumen rencana yang telah disusun tidak hanya sebatas dokumen tanpa implikasi.

Tentunya Renja ini membutuhkan umpan balik (*feedback*) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program di masa mendatang. Dengan demikian, program-program pembangunan akan lebih terarah dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang melalui perencanaan yang terintegrasi.

Simpang Empat, September 2021


RANDY HENDRAWAN, S.IP., M.Si
Pembina IV a
NIP.198712122007011002